

## INDONESIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK: SEBUAH UPAYA INTERNALISASI GENERIC SKILLS PADA MAHASISWA

**Sri Sumaryati**

Universitas Sebelas Maret

thathikfkip@gmail.com

### Abstrak

Nilai generic skills sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa dalam usahanya meningkatkan kemampuannya untuk bersaing di pasar global. Untuk itu Perguruan Tinggi, dalam hal ini Program Studi hendaknya mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa ini melalui kegiatan pembelajaran beserta perangkatnya, yang akhirnya terjabar pada sebuah kurikulum. Tujuan penulisan artikel ini adalah menawarkan suatu strategi yang mampu mengintegrasikan nilai *generic skills* dalam kurikulum pendidikan ekonomi. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil review literature yang relevan serta laporan hibah pengembangan kurikulum Prodi Pendidikan Ekonomi. Artikel ini menyimpulkan bahwa nilai *generic skills* dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar secara berkelanjutan sejak mahasiswa baru masuk perguruan tinggi sampai mereka lulus.

Kata kunci: *Generic skills*, kurikulum

### PENDAHULUAN

Peningkatan ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM/*HDI*) negara Indonesia dari ranking 121 pada tahun 2012 menjadi ranking 108 pada tahun 2013 merupakan kabar menggembirakan bagi bangsa. Namun, jika mencermati posisi ranking negara-negara terdekat seperti Malaysia yang mengalami kenaikan dari ranking 64 ke ranking 62, Singapura dari ranking 18 ke ranking 9, Brunei Darussalam pada ranking yang sama yaitu 30, dan China dari ranking 101 ke ranking 91 (UNDP 2013, UNDP 2014), maka posisi *HDI* Indonesia masih perlu ditingkatkan agar posisinya tidak terlalu jauh dari posisi negara-negara tetangga. Agar dapat menduduki posisi yang lebih baik diperlukan kerja keras untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia, meningkatkan daya saing bangsa, di tengah-tengah persaingan dengan masyarakat dunia lainnya. Ini semua merupakan pekerjaan rumah seluruh rakyat Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Mengingat bahwa salah satu indikator dari IPM adalah sektor pendidikan, maka para pelaku pendidikan, khususnya pendidikan ekonomi, mempunyai tugas yang tidaklah ringan untuk dapat mengembangkan pendidikan ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendidikan ekonomi dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan ekonomi dan keuangan yang

sangat diperlukan pada masa ekonomi global yang sedang dihadapi masyarakat dunia saat ini.

Untuk menghadapi era globalisasi, SDM yang mampu bersaing mutlak diperlukan. (Salladien, 1996) Hampir semua pakar ketenagakerjaan setuju bahwa kunci sukses suatu organisasi adalah SDM yang memiliki kompetensi kerja (Karami dkk, 2004). Oleh karenanya, sebagai upaya peningkatan kualitas SDM yang berasal dari lulusan pendidikan tinggi, sangatlah berhubungan dengan pengembangan berbagai ketrampilan yang relevan (*generic skills*), sehingga dengan semakin meningkatnya kompetensi lulusan diharapkan dapat memenuhi keragaman permintaan pasar kerja era globalisasi. Sebagai institusi di bawah LPTK, pendidikan ekonomi mendapat mandat untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, yang beragam sesuai dengan keragaman aktivitas dan dapat dikembangkan selama proses pembelajaran berlangsung (Robbins, 2003:465; Vecchio, 1992: 78; Nelson & Quick, 1994:21 dalam T. Watts, 2008)

Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana cara melaksanakan pendidikan ekonomi yang mampu meningkatkan *generic skills mahasiswa pendidikan ekonomi*? Chapple & Tolley, 2000; Fallows & Steven, 2000 dalam Robley, 2005 mengemukakan bahwa hal yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan materi-materi pembelajaran yang dapat mengakomodasi peningkatan *generic skills*, atau melalui internalisasi nilai-nilai *generic skills* pada setiap program yang dilakukan secara kontinyu yang terjabar dalam kurikulum. Kurikulum merupakan "... seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu" (UU RI Nomor 20 Tahun 2013). Agar dapat mencapai tujuan pendidikan menghasilkan guru yang mampu melaksanakan pendidikan ekonomi, maka kurikulum pendidikan ekonomi dapat didesain dengan muatan mata kuliah, pengalaman belajar dan perencanaan pembelajaran ekonomi sedemikian rupa. Perlu diperhatikan juga bahwa *generic skills* sangat penting untuk dimiliki oleh lulusan Pendidikan Ekonomi pada khususnya, dan semua mahasiswa pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Satoshi (2010) bahwa "*Generic skills are important for higher education graduates in their employment, successful competition in labor market, development of career in organization and bringing individual input in the successful development of democratic society. Developed generic skills ensure broader person's social security and possibilities for self-realization.*"

Dengan demikian, ketika suatu negara menginginkan kualitas sumber daya manusia, khususnya calon pendidik, yang mampu bersaing maka negara tersebut dapat mengawalinya melalui pembangunan *generic skills* bagi bangsanya. Oleh karena itu, peran LPTK sangatlah besar. Artikel ini bertujuan untuk menawarkan suatu strategi integrasi pengembangan *generic skills* dalam kurikulum pendidikan ekonomi. 'Kurikulum merupakan cetak biru dari keseluruhan proses pembelajaran pada sistem pendidikan.....' (Dikti, 2012: ii). Melalui kurikulum dapat diketahui arah semua aktivitas pendidikan

dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu pengembangan manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, teknologi serta karakter sesuai dengan falsafah hidup bangsa dan penciri institusi pendidikan di mana mereka belajar. Oleh karena itu, suatu institusi pendidikan dituntut mampu mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga (IPTEKSO).

Kurikulum pendidikan tinggi saat ini mengalami pembaharuan dalam konsep kurikulum, sebagaimana dalam buku pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Beberapa pembaharuan konsep kurikulum antara lain: 1) Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan. 2) Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 3) Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (content based), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. 4) Dalam Kepmendiknas no 232/U/2000, hasil belajar ditekankan pada keutuhan kompetensi berkarya, sehingga matakuliah dikelompokkan ke dalam Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Melalui kurikulum tersebut, suatu program studi mengantar mahasiswanya memiliki kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Setiap kompetensi dapat mengandung 5 elemen kompetensi yaitu landasan kepribadian, penguasaan IPTEKSO, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangannya, setelah terbit Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), maka kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran setiap program studi harus mengacu pada rumusan deskripsi pada KKNI sesuai dengan jenjang/levelnya. Lulusan S1 harus memiliki kualifikasi level 6, di mana lulusan setara S1 dituntut memiliki kemampuan di bidang kerja yaitu mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, memiliki penguasaan pengetahuan yaitu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, serta mempunyai sikap dan perilaku dalam berkarya berupa bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi (Dikti, 2012).

Kurikulum berbasis kompetensi menuju KKNi yang didesain oleh suatu program studi tetap harus bermuatan pendidikan karakter. Apabila dicermati, maka setiap elemen kompetensi mengandung unsur karakter yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, elemen kompetensi landasan kepribadian akan menghasilkan karakter lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia; elemen sikap dan perilaku berkarya akan menghasilkan karakter lulusan yang profesional. Kesemua unsur karakter tersebut menuju pada pembangunan manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Rumusan kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan dari suatu program studi seharusnya dirumuskan oleh suatu forum komunikasi atau asosiasi program studi sejenis misalnya rumusan kompetensi pendidikan ekonomi ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Ekonomi. Dengan demikian semua program studi sejenis akan memiliki kemampuan minimal yang relatif sama, sehingga rumusan kompetensi tersebut dapat menjadi penyetara kualifikasi lulusan program studi. Walaupun rumusan kompetensi ditetapkan secara bersama, namun suatu program studi dapat mengembangkannya sendiri kompetensi lain sebagai penciri dari program studinya. Dengan demikian, jika suatu program studi memiliki kehendak untuk menanamkan generic skills pada mahasiswa, maka hal ini bukanlah hal yang mustahil.

## **PEMBAHASAN**

### **Pembelajaran di Perguruan Tinggi Saat Ini**

Kondisi pembelajaran di program studi/ perguruan tinggi masih cukup beragam. Perguruan tinggi yang telah menjalankan sistem penjaminan mutu dengan baik dari jenjang institusi sampai program studi umumnya telah melaksanakan pembelajaran yang berbasiskan capaian. Namun permasalahan utama yang dihadapi Perguruan Tinggi dalam mengembangkan kurikulumnya yaitu:

1. Kurangnya persiapan dosen di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran;
2. Ketidakjelasan rumusan capaian pembelajaran;
3. Ketidakjelasan strategi dan metode pembelajaran;
4. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang belum tentu tepat untuk memunculkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;

5. Aktivitas asesmen cenderung pada pemberian skor/nilai kepada mahasiswa daripada memberikan tuntunan untuk membuka potensinya; dan
6. Instrumen untuk melakukan asesmen cenderung mencirikan asesmen sumatif dari pada asesmen formatif.

Hal di atas dapat mengindikasikan bahwa pemahaman dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang baik masih lemah atau dosen kurang peduli terhadap capaian pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran serta cara asesmen yang tepat. Ada anggapan bahwa dengan tatap muka sekali dalam satu minggu telah dilakukan pembelajaran sesuai dengan tuntutan aturan yang ada dengan ukuran pembelajaran yang baik adalah jumlah tatap muka di kelas. Di samping itu, sistem jaminan mutu pendidikan sering tidak berfungsi dengan baik, seperti sistem pendukung terkait dengan tata kelola sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan pembelajaran, sistem pelayanan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut dari hasil evaluasi. Sering yang menjadi alasan tidak berkembangnya sistem pembelajaran dengan baik adalah kurangnya pendanaan. Walaupun pendanaan merupakan bagian dari perencanaan yang krusial dalam mendirikan atau mengembangkan program studi, nilai-nilai dalam pembelajaran semestinya tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, tidak sedikit perguruan tinggi yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan baik, mampu mengembangkan nilai-nilai internalnya untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang dinamis. Perguruan tinggi seperti itu dengan mudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat lokal sekitarnya, nasional, dan bahkan internasional. Sistem pembelajaran merupakan bagian penting untuk mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.

Sistem pembelajaran yang baik mampu memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuka potensi dirinya dalam menginternalisasikan pengetahuan, keahlian, dan perilaku serta pengalaman belajar sebelumnya. Sistem pembelajaran seperti itu mampu mengembangkan elemen-elemen kompetensi yang diamanatkan oleh Kepmendiknas No. 045/2002. Dengan dikeluarkannya Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), program studi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi KKNI. Dengan demikian bagi Perguruan Tinggi yang masih bermasalah di dalam sistem pembelajarannya mesti segera melakukan pembenahan atau perbaikan untuk mampu menghasilkan lulusan paling tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Demikian pula sistem penjaminan mutu pendidikannya mesti mampu mengendalikan proses pendidikan dengan baik merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI.

Mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata di bidang sains dan diberi tugas untuk menyelesaikannya sebagai suatu cara pembelajaran. Dosen diharapkan dapat menerima kesalahan dalam proses pembelajaran sebagai hal yang wajar dan memotivasi untuk memperbaiki secara terus-menerus. Proses pembelajaran yang diterapkan benar-benar menyatu dengan materi pembelajaran yang diformat sesuai dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif secara benar menurut empat pilar pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan di Indonesia di dalam proses dan materi

pembelajaran dari KBK di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk pembelajaran terpusat dosen (*teacher-centered learning*/TCL), tetapi diganti dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpusat mahasiswa (*student-centered learning*/SCL) yang diramu untuk dapat diterapkan, serasi dengan keadaan Perguruan Tinggi di Indonesia.

### **Qualifications Framework Concept**

Menganalisis kualifikasi kerangka kerja dan pengalaman perkembangan mereka di negara-negara Eropa dan negara-negara lain dunia yang berbeda-beda, hal ini sangat dipengaruhi oleh tujuan mereka dan konteks aplikasi. Secara umum, kerangka kualifikasi dapat didefinisikan sebagai "Deskripsi sistematis kualifikasi yang sistem pendidikan" (Adam 2003). Mengikuti pendekatan ini, adalah mungkin mengklaim bahwa setiap negara memiliki kerangka kualifikasi nasional, meskipun belum tentu bernama cara ini. Namun persyaratan tertentu yang ditetapkan untuk deskripsi kualifikasi disebabkan tingkat kualifikasi tertentu dalam kualifikasi kerangka. Menurut Irma (2010) dasar dari setiap Kerangka kualifikasi adalah deskripsi umum dari kualifikasi dan / atau gelar kualifikasi disediakan dalam tertentu wilayah atau negara menunjukkan kondisi yang diperlukan dan kesempatan untuk memperoleh kualifikasi pada tingkat lain.

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Sosial dan Pembangunan (OECD) menyajikan definisi berikut dari kerangka kualifikasi adalah "alat untuk pengembangan dan klasifikasi kualifikasi menurut seperangkat kriteria untuk tingkat pembelajaran tercapai. Ini seperangkat kriteria mungkin tersirat dalam kualifikasi deskriptor sendiri atau dibuat eksplisit dalam bentuk satu set tingkat deskriptor" (Kuriant; 2005 dalam Karseth & Solbrekke, 2010). Untuk membuat jelas perlu dicatat bahwa kualifikasi Kerangka dapat dilihat dari berbagai jenis dan dibuat di berbagai tingkat. M. Young (2005) dalam Karseth (2010) telah menjelaskan perbedaan antara yang komprehensif dan kerangka kualifikasi parsial dilihat dari ruang lingkupnya. Kerangka kualifikasi yang komprehensif dipahami sebagai kerangka kerja terpadu, termasuk kualifikasi dari semua jenis, diperoleh dengan cara formal, non-formal dan informal dan diperlukan untuk bekerja di berbagai bidang ekonomi. kualifikasi parsial kerangka meliputi kualifikasi yang merupakan ciri khas dari lingkup tertentu. Kualifikasi parsial dapat kualifikasi tersebut kerangka yang sistematis menggambarkan berikut:

1. kualifikasi yang diperoleh di sektor konkret dari sistem pendidikan dan diperlukan untuk pekerjaan di berbagai sektor ekonomi (misalnya, kerangka kualifikasi yang membatasi dirinya untuk kualifikasi disediakan dalam sistem pendidikan tinggi);
2. kualifikasi yang dari jenis tertentu yang dapat diperoleh di berbagai sektor dari sistem pendidikan dan diperlukan untuk pekerjaan di berbagai sektor ekonomi (misalnya, kualifikasi Kerangka yang hanya mencakup kualifikasi kejuruan);
3. kualifikasi berorientasi pada sektor konkret ekonomi yang dapat diperoleh di berbagai sektor dari sistem pendidikan (untuk Misalnya, kerangka kualifikasi yang sistematis menggambarkan kualifikasi khusus untuk sektor konstruksi).

### **Generic skills dan atributnya**

*Generic skills sendiri diartikan sebagai Skills or abilities pertaining to genes, thus as mater of heredity are transferred through genes from one generation to another* (Sumsion, 2007) Dengan kata lain generic skills adalah ketrampilan yang dapat dibutuhkan di tempat kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Dari semua ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang generic skills merupakan ketrampilan utama yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja, sebab *generic skills* ini merupakan portable skills yang dimiliki seseorang dan siap dimanfaatkan di tempat kerja (University of Cambridge, 2003; Smith, 2003; Gilbert, 2007). Keterampilan tersebut sebenarnya bisa dialihkan atau hanya dapat dipelajari dalam konteks mereka digunakan; keterampilan yang dipelajari secara otomatis dalam program studi dan tidak boleh disarikan dari itu; fokus pada keterampilan akan mempersempit tujuan kurikulum untuk reduksionis dan supercial hasil-hasil pada biaya belajar lebih dalam dan lebih banyak gol reflektif atau kritis (Gilbert, 2007)

Menurut hasil survey ketenagakerjaan di Inggris (2003), ada empat *personal transferable skills* yang dipandang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja era globalisasi. empat ketrampilan ini diinformasikan sebagai atribut yang sangat penting, di mana *employers* sudah merasa cukup jika tenaga kerja yang dikelolanya memiliki ketrampilan tersebut, yaitu kemampuan mendapatkan informasi, komunikasi dan presentasi, merencanakan dan problem solving, dan kemampuan bersosialisasi (Atlay, 2000). Jewish (2009) mengidentifikasi atribut penting *transferable skills* yang digunakan dalam dunia kerja, yaitu sebagai berikut: 1) komunikasi verbal, 2) komunikasi non-verbal, 3) menulis laporan, 4) bekerja dengan orang lain, 5) bekerja dengan teknologi dan informasi, 6) menganalisis masalah, 7) memecahkan masalah, dan 8) berorganisasi.

Terkait dengan hal ini adalah *Job Characteristics Model* (JCM), setiap pekerjaan dapat diuraikan sesuai dengan lima dimensi inti kerja yaitu: 1) Keragaman ketrampilan, yaitu tingkat di mana suatu pekerjaan membutuhkan aktivitas yang beragam sehingga pekerja harus dapat memanfaatkan beberapa ketrampilan dan bakat yang berbeda; 2) Identitas tugas, yaitu tingkat di mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari keseluruhan atau sebagian tugas yang dapat diidentifikasi; 3) Signifikansi tugas, yaitu tingkat di mana suatu pekerjaan menyediakan dampak substansial pada kehidupan atau pekerjaan orang lain; 4) Otonomi, yaitu tingkat di mana suatu pekerjaan menyediakan kebebasan substansial dan kebebasan berkreasi kepada setiap individu dalam menjadwalkan kerja dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. 5) Umpan balik, yaitu tingkat di mana pelaksanaan kegiatan suatu pekerjaan menuntut hasil kerja secara langsung dan informasi yang jelas tentang keefektifan pekerja (Karami, 2000).

### **Cara Meningkatkan Generic Skills**

*Generic skills* dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan pembelajaran dan peningkatan kualitas lulusan ini dilakukan agar lulusan

memiliki nilai pasar yang lebih baik dari waktu ke waktu. Peningkatan ini pada gilirannya akan meningkatkan *competitive advantage* mereka, sehingga lebih mudah memenangkan persaingan pada dunia kerja.

Berubahnya kurikulum menyebabkan isu-isu tentang proses belajar-mengajar yang dilaksanakan saat ini juga menarik perhatian. Fokus pembelajaran berbasis kompetensi telah mendorong adanya kaji ulang terkait praktek-praktek penilaian yang saat ini berlangsung. Saat ini penilaian telah bergeser ke arah penilaian personal *generic skill* daripada penilaian hanya dari isi akademik dari apa yang dipelajari mahasiswa (T. Watts and C. J. McNair, 2008)

Teori pengembangan *generic skills* yang dikemukakan oleh Gilbert (2004) yang mengemukakan bahwa *generic skills* dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat diartikan ke dalam peningkatan tiga tahap proses pembelajaran yaitu: (1) tahap perencanaan atau perancangan pembelajaran, (2) tahap pelaksanaan pembelajaran dan (3) tahap pengukuran. Melalui teori tersebut pengembangan *generic skills* mahasiswa dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran secara terpadu, yaitu 1) keterampilan tersebut sebenarnya bisa dialihkan atau hanya bisa dipelajari dalam konteks mereka digunakan; 2) keterampilan dipelajari secara otomatis dalam program studi; 3) Fokus pada keterampilan yang dituju; 4) mahasiswa tersebut dimotivasi oleh tujuan atau kemanfaatan dari *generic skills* 5) mengembangkan beberapa kualitas intrapersonal dan interpersonal yang *skills*. Robley (2005) mempunyai alternatif dengan melakukan internalisasi nilai-nilai *generic skills* pada setiap program yang dilakukan pada sebuah kegiatan pembelajaran.

Peningkatan kualitas pembelajaran untuk mata kuliah dapat digunakan sebagai sarana peningkatan *generic skills*, mahasiswa sebaiknya dimonitor dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan agar kualitas pembelajaran, kognisi, prestasi, *generic skills* mahasiswa, yang dapat diamati dan terukur dari waktu ke waktu.

Adalah fakta, bahwa banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap di dunia kerja yang bisa jadi disebabkan karena kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau dengan kata lain tidak ada *link and match* antara sistem pendidikan nasional dengan sistem ketenagakerjaan, atau karena kurikulum pendidikan yang kurang mampu menghasilkan lulusan mandiri dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu wajar jika posisi IPM negara Indonesia berada pada *medium human development*, karena dari satu indikator yaitu standar hidup yang dilihat dari pendapatan per kapita sudah tereduksi oleh pengangguran yang ada.

Upaya peningkatan *generic skills* telah banyak dilakukan, yang semua itu bertujuan agar lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan memahami dan berorientasi pada orang lain, kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan dan mengatur informasi baru, kemampuan berpikir yang memungkinkan orang-orang untuk memproses ide, serta kemampuan seseorang yang terkait dengan kemampuan mengambil tindakan dan keputusan. apabila kemampuan ini telah melekat pada semua lulusan PT, maka berkurangnya pengangguran dan kejahatan bukanlah suatu



keniscayaan. Mencermati hal tersebut, maka tidaklah mengherankan jika saat ini banyak program studi, tidak terkecuali pendidikan ekonomi, menetapkan nilai plus mahasiswa dalam usahanya mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Namun pada kenyataannya banyak program studi yang belum mendesain pembelajaran yang mampu menginternalisasi nilai-nilai ini. dalam pembelajaran, seringkali lebih banyak menekankan pada aspek kognitif. Padahal, agar seseorang berperilaku baik, maka diperlukan pengetahuan, keterampilan, sifat, motivasi, dan peran sosial yang pada akhirnya muncul dalam bentuk perilaku. Dengan demikian ketika program studi menetapkan internalisasi *generic skills* ini, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak mungkin perguruan tinggi mengharapkan semua mahasiswa dan lulusannya disiapkan menjadi pribadi-pribadi yang handal, yang mampu bersaing pada era modern ini. Jadi, pendidikan di Perguruan Tinggi bukan berarti pendidikan sekedar *transfer of knowledge* tapi sudah berkembang pada *transfer of value*. Untuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan ekonomi maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

#### **Penetapan profil lulusan.**

Profil lulusan merupakan luaran pendidikan yang akan dihasilkan. Ketika menetapkan profil lulusan, program studi telah mempertimbangkan kebijakan universitas dan program studi yang antara lain tercermin dalam visi dan misi. Dalam profil lulusan sudah terkandung nilai-nilai dan keyakinan yang dikembangkan universitas dan program studi. Dari sini dapat diketahui bagaimana komitmen perguruan tinggi terhadap proses internalisasi nilai *generic skills* yang akan diberikan kepada mahasiswa.

#### **Penetapan kompetensi lulusan**

Program studi menetapkan kompetensi apa saja yang harus dimiliki lulusannya, sekaligus menetapkan kompetensi apa saja yang harus mampu dilakukan oleh lulusan serta dimilikinya *generic skills* misalnya memanfaatkan dan mengatur informasi baru, kemampuan berpikir yang memungkinkan orang-orang untuk memproses ide, serta kemampuan seseorang yang terkait dengan kemampuan mengambil tindakan dan keputusan, dan kemampuan lainnya sesuai dengan kondisi program studi. Jika kompetensi yang bersifat umum ditetapkan bersama oleh asosiasi program studi sejenis, maka kompetensi ini dapat menjadi kompetensi sebagai penciri program studi.

#### **Penetapan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran**

Setelah menetapkan profil lulusan sebagai outcome program studi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Untuk menetapkan kompetensi lulusan, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan: "Untuk menjadi profil ..... lulusan harus mampu melakukan apa saja?" Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil, sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan yang lengkap.

Kompetensi lulusan ini minimal harus mengandung 4 unsur deskripsi KKNI, yakni:

1. Deskripsi umum, sebagai ciri lulusan pendidikan di Indonesia;

2. Rumusan kemampuan di bidang kerja;
3. Rumusan lingkup keilmuan yang harus dikuasai; dan
4. Rumusan hak dan kewenangan manajerialnya

### **Pengkajian Kandungan Elemen Kompetensi**

Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap rumusan kompetensi lulusan yang telah terumuskan, dengan lima elemen kompetensi yang terdapat pada SK Mendiknas 045/U/2002, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya; serta (e) kaidah pemahaman berkehidupan bermasyarakat.

Setiap kompetensi yang dirumuskan dianalisis untuk melihat adanya kandungan elemen kompetensi tersebut di atas. Ada kemungkinan sebuah kompetensi mengandung lebih dari satu elemen kompetensi. Analisis adanya kandungan elemen kompetensi dilakukan dengan cara mengecek kemungkinan strategi pembelajaran untuk dapat mencapai kompetensi tersebut. Jika suatu kompetensi dapat dicapai dengan diselipkan ke dalam bentuk kurikulum terselubung, tidak diajarkan dalam sebagai topik bahasan, maka kompetensi tersebut dapat dinyatakan bermuatan elemen (a) landasan kepribadian yang lebih bersifat soft skills.

### **Penentuan bahan kajian atau materi ajar**

Setelah menganalisis elemen kompetensi, langkah selanjutnya adalah menentukan bahan kajian yang akan harus dikuasai untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, atau bidang kajian yang merupakan inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan yang dibutuhkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan pada masa yang akan datang. Pilihan bahan kajian itu sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya, diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian merupakan hak otonom masyarakat akademik di program studi tersebut.

Agar lulusan menguasai kompetensi yang ditetapkan maka kajian apa saja yang perlu dikuasai. Bahan kajian terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan yang dibutuhkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Program studi dapat menentukan bahan kajian yang mendukung kompetensi yang diharapkan dapat dicapai bagi mahasiswa.

### **Pembentukan Mata Kuliah/Kegiatan**

Berdasarkan bahan kajian kemudian dibentuk matakuliah dan atau kegiatan yang terprogram dan terintegrasi. Perlu diingat bahwa generic skills secara utuh tidak dapat dibentuk dalam satu atau beberapa matakuliah secara terpisah. Dengan demikian pembentukan mata kuliah dan kegiatan dapat dijabarkan dalam tahapan misalnya tahap pengenalan.

### **Pembentukan Program dengan mengintegrasikan nilai *generic skills***

Setelah penentuan profil lulusan sampai dengan pembentukan mata kuliah dan kegiatan, selanjutnya program studi sebaiknya menata secara terstruktur pelaksanaan program pendidikan yang mengintegrasikan nilai *generic skills* dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Di sini bentuk dari program akan menunjukkan nama kegiatan, tujuan kegiatan, pelaksana kegiatan, indikator ketercapaian, sarana prasarana yang diperlukan. Dengan melaksanakan program yang terjadwal dengan baik sejak mahasiswa pertama kali masuk kampus sampai mereka lulus maka secara tidak langsung akan membentuk iklim kewirausahaan di lingkungan kampus. Walaupun sangat dimungkinkan bahwa sarana prasarana menjadi kendala pelaksanaan, namun dengan berbekal komitmen yang tinggi maka kendala akan menjadi tantangan yang jika didekati dengan perilaku yang mengintegrasikan nilai *generic skills* dalam kegiatan pembelajaran maka akan menghasilkan prestasi yang luar biasa.

### **SIMPULAN**

Nilai *generic skills* sangat diperlukan dalam bidang pekerjaan apapun, termasuk guru. Pengintegrasian nilai ini dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar secara berkelanjutan dan terprogram sejak mahasiswa baru masuk perguruan tinggi sampai mereka lulus. Proses yang panjang tersebut dapat dilakukan melalui mata kuliah dalam aktual kurikulum, dalam *hidden curriculum*, kegiatan pengenalan, pelatihan, penguatan, pengembangan dan praktik. Agar dapat melaksanakannya maka perlu ada komitmen dari institusi, ada pernyataan yang jelas nilai-nilai dan keyakinan apa yang dikembangkan, ada kegiatan yang dilakukan agar dapat memfasilitasi kebutuhan mahasiswa yang bervariasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anne Daly, Lynne Leveson, Peter Dixon. (2011). Separate or Integrate? The contribution of the Workshop Model to Effectively Embedding Generic Skills, *Asian Social Science* Vol. 7, No. 4; April 2011, Published by Canadian Center of Science and Education.
- Atlay, M. & Harris, R. (2000). An Institutional Approach To Developing Students' 'Transferable' Skills, *Innovations in Education and Training International*, 37(1), 76-84.
- Dikti. 2012. *Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan.
- Irma Spudyte, Saulius Vengris, Mindaugas Misiunas, 2010, QUALIFACATIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK, 2010
- Jewish C. 2009. *Functional Transferable Skills*, Manitoba: Child and Family Service.

- Karami, Azhdar;Analoui, Farhad; Cusworth, John (2004). Strategic Human Resource Management and Resource-based Approach: The Evidence From the British Manufacturing, *Management Research News*; 2004; 27, 6
- Karseth, B. & Solbrekke, T.D. (2010) Qualifications Frameworks: The Avenue Towards The Convergence of European Higher Education?, *European Journal of Education*, Vol. 45, No. 4, 2010
- Rob Gilbert, Jo Balatti, Phil Turner and Hilary Whitehouse, 2004, The Generic Skills Debate In Research Higher Degrees, *Higher Education Research & Development* Vol. 23, No. 3, August 2004
- Robley, W., Whittle, S. & Murdoch-Eaton, D. (2005). Mapping Generic Skills Curricula: A Recommended Methodology, *Journal of Further and Higher Education* Vol. 29, No. 3, August 2005, pp. 221–231
- Salladien. 1996. *Pendidikan Berorientasi pada Profesi Merupakan Upaya Menghadirkan Tenaga Kerja yang Profesional di Era Tinggal Landas yang Penuh Dinamika*. Makalah yang Disampaikan pada Acara Wisuda Program Diploma. IKIP Malang
- Satoshi Sugahara, Perceived Importance of CPA's Generic Skills: A Japanese Study, *Asian Journal of Finance & Accounting* ISSN 1946-052X 2010, Vol. 2, No. 1: E1
- Smith, Rosita. 2003. *Transferable Skills*. On <http://www.placement-mannual.online>
- T. Watts and C. J. McNair, Trigger Points: Enhancing generic skills in accounting Education through changes to teaching practices, *The Australasian Accounting Business & Finance Journal*, June, 2008. Vol. 2, No.2. Page 34
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2013. <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>, diunduh tanggal 10 Januari 2015 jam 20.05
- UNDP. 2014. *Human Development Report 2014*. <Http://hdr.undp.org/en>. Diunduh pada tanggal 13 April 2015, jam 20.55.
- University of Cambridge. 2003. *Transferable Skills*. On <http://www.webmaster@phil.cam.ac.uk>